

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2017, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950, yang ditetapkan pada tanggal 2 Pebruari 1950, Jawa Timur merupakan gabungan dari Pemerintahan Daerah Karisidenan Surabaya, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bojonegoro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
27. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
30. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
32. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa luas wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur sebesar 47.799,75 Km², Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar

90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Timur



Sumber : Peta Rupa Bumi Indonesia – Badan Informasi Geospasial

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota se Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
1	Kabupaten Pacitan	12	5	166	171	1.389,92
2	Kabupaten Ponorogo	21	26	281	307	1.305,70
3	Kabupaten Trenggalek	14	5	152	157	1.147,22
4	Kabupaten Tulungagung	19	14	257	271	1.055,65
5	Kabupaten Blitar	22	28	220	248	1.336,48
6	Kabupaten Kediri	26	1	343	344	1.386,05
7	Kabupaten Malang	33	12	378	390	3.530,65
8	Kabupaten Lumajang	21	7	198	205	1.790,90
9	Kabupaten Jember	31	22	226	248	3.092,34
10	Kabupaten Banyuwangi	24	28	189	217	5.782,40
11	Kabupaten Bondowoso	23	10	209	219	1.525,97
12	Kabupaten Situbondo	17	4	132	136	1.669,87
13	Kabupaten Probolinggo	24	5	325	330	1.696,21
14	Kabupaten Pasuruan	24	24	341	365	1.474,02
15	Kabupaten Sidoarjo	18	31	322	353	634,38
16	Kabupaten Mojokerto	18	5	299	304	717,83
17	Kabupaten Jombang	21	4	302	306	1.115,09

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)
			Kelurahan	Desa	Jumlah	
18	Kabupaten Nganjuk	20	20	264	284	1.224,25
19	Kabupaten Madiun	15	8	198	206	1.037,58
20	Kabupaten Magetan	18	28	207	235	688,84
21	Kabupaten Ngawi	19	4	213	217	1.295,98
22	Kabupaten Bojonegoro	28	11	419	430	2.198,79
23	Kabupaten Tuban	20	17	311	328	1.834,15
24	Kabupaten Lamongan	27	12	462	474	1.782,05
25	Kabupaten Gresik	18	26	330	356	1.191,25
26	Kabupaten Sampang	14	6	180	186	1.233,08
27	Kabupaten Pamekasan	13	11	178	189	792,24
28	Kabupaten Sumenep	27	4	330	334	1.998,54
29	Kabupaten Bangkalan	18	8	273	281	1.001,44
30	Kota Kediri	3	46	0	46	63,40
31	Kota Blitar	3	21	0	21	32,57
32	Kota Malang	5	57	0	57	145,28
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29	56,67
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34	35,29
35	Kota Mojokerto	2	18	0	18	16,47
36	Kota Madiun	3	27	0	27	33,92
37	Kota Surabaya	31	154	0	154	350,54
38	Kota Batu	3	5	19	24	136,74
J U M L A H		664	777	7.724	8.501	47.799,75

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km² atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 Km² setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur. Sementara itu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan.

1.2. Letak dan Kondisi Geografis

a. Posisi Astronomis

Kondisi geografi Jawa Timur sangat strategis, hal ini karena Jawa Timur menjadi pintu utama perdagangan di Indonesia bagian timur, secara

astronomis terletak antara $111,0^{\circ}$ - $114,4^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,12^{\circ}$ - $8,48^{\circ}$ Lintang Selatan

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

b. Kawasan

Kondisi/kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 5 aspek yaitu :

- **Kawasan Perkotaan**

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam rencana struktur ruang berdasarkan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, terdapat perkotaan-perkotaan di Provinsi Jawa Timur yang berfungsi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Malang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan; Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yaitu Pasuruan dan Batu; serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang,

Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kepanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil.

- **Kondisi/Kawasan Daerah Tertinggal**

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Infrastruktur, Kemampuan keuangan lokal, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur : Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan bagian dari 122 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.

- **Kondisi/Kawasan Pesisir**

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air

tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang mengelilinginya yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya. Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.

- **Kawasan Pegunungan**

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

- **Kawasan Kepulauan**

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur berada dalam wilayah administratif terdiri dari 445 buah pulau yang tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

1.3. Topografi

Kondisi topografi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain :

a. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Jawa Timur Bagian Selatan.

Gambar 1.2
Peta Kemiringan Lereng



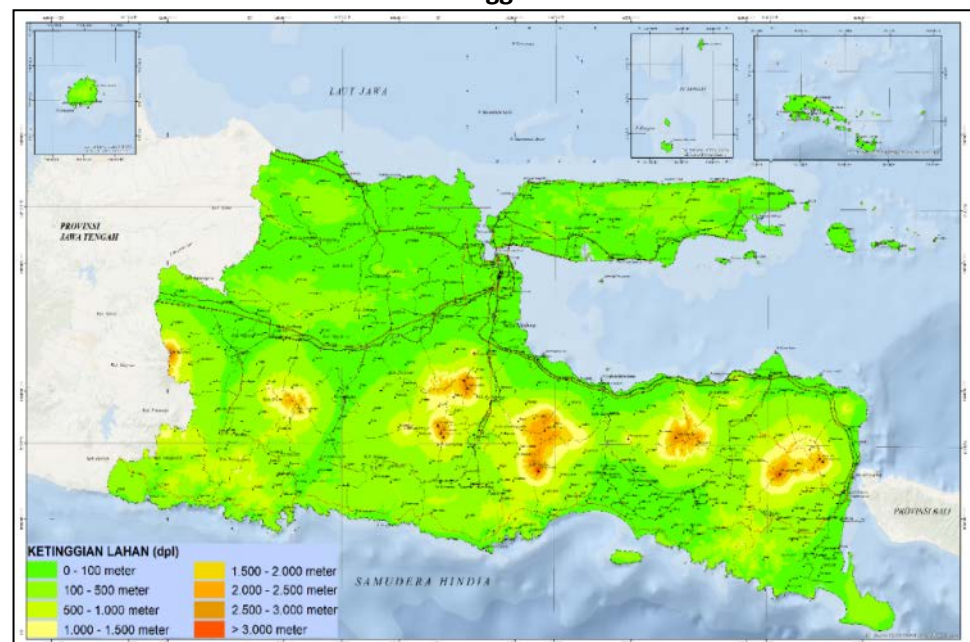
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Gambar 1.3
Peta Ketinggian Lahan



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

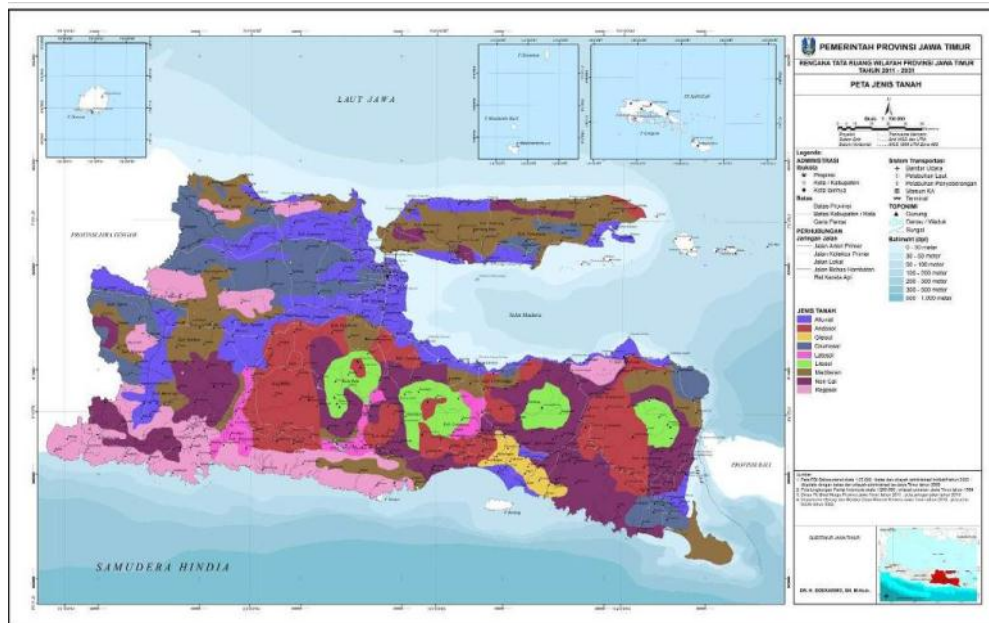
1.4. Geologi

a. Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan

Kwarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur adalah wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian namun sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 % dan sekitar 65,49 % merupakan wilayah yang subur yang terdiri atas dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir, dataran aluvial di lajur Kendeng, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan.

Gambar 1.4
Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Potensi Kandungan

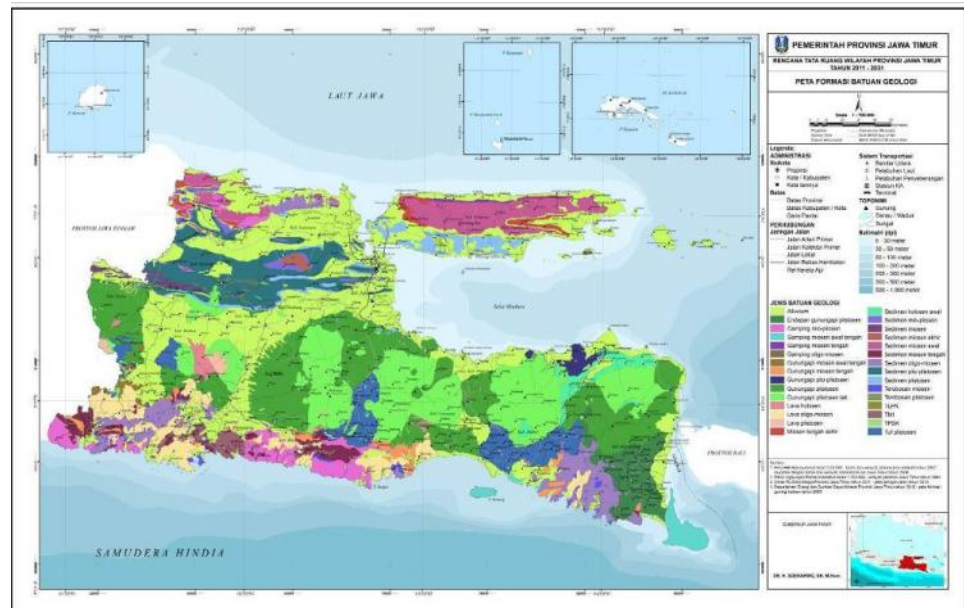
Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya mineral, yang dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:

- Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
- Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping;
- Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api

kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan

- Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.

Gambar 1.5
Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

1.5. Hidrologi

a. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Provinsi Jawa Timur dialiri oleh 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis nasional, yaitu DAS Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai/kali terbesar di Jawa Timur dengan panjang \pm 320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Kelud. Kali Brantas yang bersumber dari lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui Kota Malang, lalu membelok ke arah selatan setelah itu pada wilayah Kepanjen, Kali Brantas membelok ke arah barat bertemu dengan Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru dan bertemu Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui Kota Kediri dan pada

wilayah Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke Kota Mojokerto dan terbagi menjadi 2 (dua), ke arah Surabaya dan Porong yang selanjutnya bermuara di selat Madura.

Gambar 1.6
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Wilayah Sungai dan Danau/Waduk

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai, dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur meliputi 7 (tujuh) Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang Rejoso, WS Pekalen Sampean, WS Baru Bajulmati, WS Bondoyudo Bedadung, dan WS Madura Bawean.

Gambar 1.7
Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Tabel 1.2
Luas Catchment Area (km²) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur

No	Wilayah Sungai	Luas (Km ²)	Jumlah DAS
1	Bengawan Solo	13.070,00	94 DAS
2	Brantas	13.880,00	20 DAS
3	Welang – Rejoso	2.601,00	36 DAS
4	Pekalen – Sampeyan	3.953,00	56 DAS
5	Baru – Bajulmati	3.675,00	60 DAS
6	Bondoyudo – Bedadung	5.364,00	47 DAS
7	Madura	4.575,00	173 DAS

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur

Luas Catchment area tertinggi di provinsi Jawa Timur berada pada Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km² dan terendah di Wilayah Sungai Welang – Rejoso dengan luas 2.601 km². Catchment area ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau, sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

1.6. Klimatologi

Keadaan iklim di Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-

Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat celcius dan maksimal 34,2 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%.

Temperatur Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 tertinggi di bulan November (35,6°C) dan terendah di bulan Juli (32,2°C), dengan kelembaban 52 sampai 98 persen. Tekanan udara tertinggi di bulan Januari sebesar 1.013,9 Milibar dan terendah pada bulan Agustus sebesar 1.000 Milibar. Rata-rata penyinaran matahari terlama di bulan November (89 persen), dan terendah di bulan Februari (52 persen). Sedangkan kecepatan angin tertinggi adalah bulan Agustus sebesar 7,9 knot dan di bulan Maret adalah yang terendah sebesar 6,5 knot. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di bulan Februari yaitu sebesar 589,6 mm3 dengan 28 hari hujan, sedangkan terendah terjadi di bulan November yaitu sebesar 52,6 mm3 dengan 5 hari hujan.

Tabel 1.3
Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2016

Bulan	Rata-rata Suhu Udara (oC)		Kelembaban Udara (Persen)		Tekanan Udara (Mb)		Kecepatan Angin (Knot)	Sinar Matahari (Persen)	Curah Hujan (mm3)
	Mak	Min	Mak	Min	Mak	Min			
Januari	35.40	23.50	97	52	1013.90	1008.80	7.10	69	167.10
Februari	34	24.10	98	58	1013.20	1008.70	7.70	52	589.60
Maret	34.30	20.40	97	58	1013.70	1008.80	6.50	67	251.60
April	34.40	24.20	97	58	1012.50	1009.70	7	68	235.10
Mei	33.70	23.60	95	57	1012.20	1008.30	6.70	76	392.80
Juni	33	23.30	96	58	1013.40	1009.30	6.80	70	174
Juli	32.20	23.80	97	52	1012.90	1009.30	7.20	84	258.40
Agustus	32.60	22.40	91	43	1012.70	1000	7.90	87	100.70
September	33.40	22.70	95	47	1013.40	1009.10	7.40	80	120.80
Oktober	34.30	24	98	46	1011.50	1009.40	7.50	36	501.70
November	35.60	24.60	90	38	1012	1009.30	7	89	52.60
Desember	35.40	23.60	96	47	1013.20	1008.40	7.50	62	132.40

1.7. Penggunaan Lahan**a. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.

Tabel 1.4
Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Budidaya Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
B	Kawasan Budidaya	4.201.403,70	87,89
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	a. Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	b. Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/Kebun Campur	1.108.627,71	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

b. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.571,30 Ha atau sekitar 12,11 Persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa

seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011).

Tabel 1.5
Penggunaan Lahan Eksisting Kawasan Lindung Provinsi Jawa Timur

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
A	Kawasan Lindung	578.571,30	12,11
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,30	4,90
	a. Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	b. Cagar Alam	10.958,00	0,23
	c. Taman Nasional	176.696,00	3,70
	d. Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	e. Taman Wisata Alam	298,00	0,01

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1 Potensi Pertanian

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk Pertanian tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan petani dan mekanisasi/modernisasi sarana-prasarana Pertanian pada sentra-sentra produksi.

Sektor Pertanian merupakan peluang terbesar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Untuk meningkatkan daya saing Pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Produk Pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi Pertanian dari hulu ke hilir untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Gambar 1.8
Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha.

2.2 Potensi Perkebunan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perkebunan tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, mekanisasi sarana dan prasarana perkebunan serta upaya peningkatan kesejahteraan petani kebun.

Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek

ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni

- Perkebunan tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen;
- Perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggolan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.

Gambar 1.9
Peta Potensi Perkebunan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Untuk meningkatkan daya saing Petani Kebun (Pekebun), akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan Industri Primer yang diarahkan untuk pengembangan pasar baik internasional maupun domestik yang dilakukan dengan memperluas promosi komoditas dan produk perkebunan. Strategi yang bisa diterapkan adalah dengan mengefektifkan penerapan teknologi perkebunan dan mengefisienkan usaha perkebunan untuk menghasilkan output dengan biaya minimum. Potensi perkebunan lainnya dalam mendukung Peningkatan Daya

Saing adalah adanya program pengembangan Industri Primer Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berupaya untuk Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi Perkebunan yang fokus kegiatan pada Kopi dan Kakao serta adanya kesediaan Perhutani bila lahannya ditanami kopi pada lereng Gunung Wilis.

2.3 Potensi Perikanan

Pengamanan ketahanan pangan dan penguatan konektivitas kemaritiman tahun 2019, dilakukan melalui kegiatan untuk peningkatan produktivitas, konservasi dan rahabilitasi laut, pesisir serta pulau-pulau kecil, optimalisasi kinerja Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jaminan kemudahan akses perbankan, perlindungan asuransi, peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk perikanan.

Gambar 1.10
Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Potensi Perikanan Provinsi Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Jawa Timur memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang

terletak di Pantai Utara Jawa Timur, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya, terdiri dari :

- Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng ;
- Sektor perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi;
- Sektor perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.

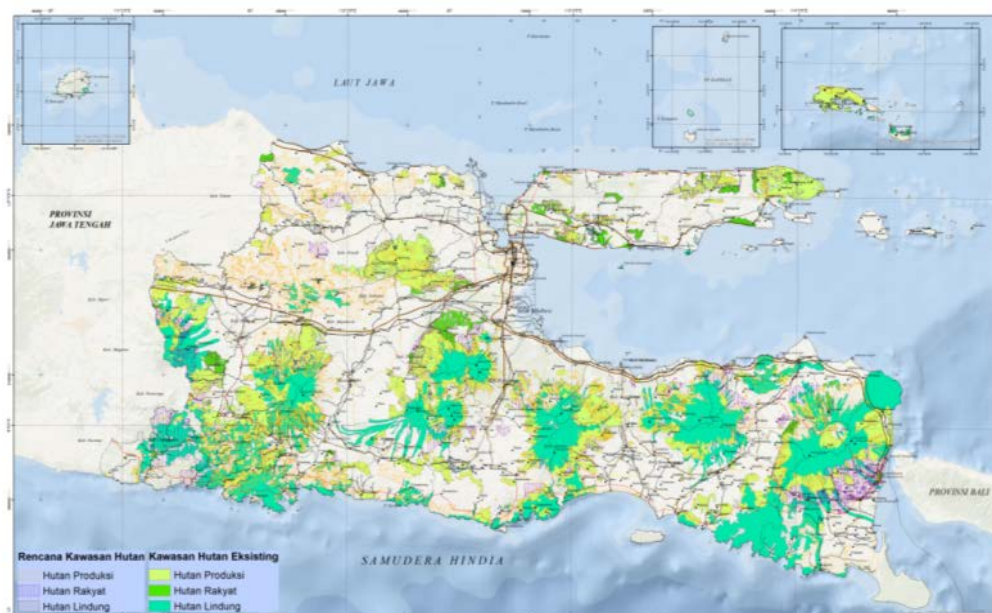
Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya.

2.4 Potensi Kehutanan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing potensi pengembangan komoditi produk hutan tahun 2019, dilaksanakan melalui kegiatan untuk meningkatkan produktivitas dan promosi produk hutan.

Kawasan hutan budidaya dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan rakyat. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan Hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan iklim makro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.

Gambar 1.11
Peta Potensi kawasan Kehutanan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.5 Potensi Peternakan

Pengamanan ketahanan pangan dan peningkatan daya saing komoditi produk peternakan tahun 2019, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas, jaminan kemudahan usaha, perlindungan, serta upaya peningkatan kesejahteraan peternak melalui pengolahan produk derivate/pabrikan serta peningkatan informasi perkembangan dan pemasaran produksi peternakan.

Kawasan peternakan secara khusus diperuntukan bagi kegiatan peternakan melalui pengembangan sentra ternak dalam skala besar maupun kecil dan sentra peternakan unggas dan lainnya. Pengembangan ternak ini akan lebih memiliki nilai tambah melalui pengembangan agrobisnis peternakan. Pengembangan kawasan agrobisnis berbasis peternakan dilakukan untuk menjawab tuntutan kecukupan (swasembada) daging dan telur serta susu dalam negeri, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kawasan peruntukan peternakan meliputi:

- Sentra peternakan ternak besar meliputi sapi, kerbau dan kuda;
- Sentra peternakan ternak kecil meliputi kambing, domba dan babi
- Sentra peternakan unggas meliputi Ayam, Itik, Entok ; dan

- Sentra ternak lainnya meliputi kelinci.

Gambar 1.12
Peta Klasifikasi Sapi Potong Provinsi Jawa Timur



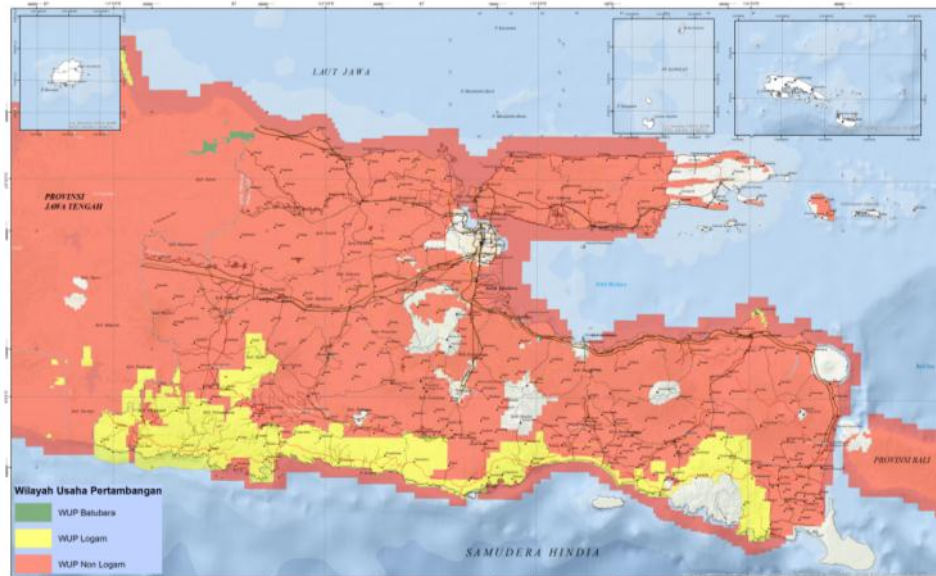
Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Strategi pembangunan peternakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bertujuan mencapai Ketahanan Pangan melalui penyediaan Protein Hewani Ternak, sehingga dibutuhkan sinergitas Pusat-Daerah untuk mencukupi kebutuhan Daging Nasional dengan mengandalkan sumberdaya lokal.

2.6 Potensi Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.

Gambar 1.13
Peta Wilayah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- a. **Pertambangan Mineral** : Pertambangan mineral di Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan.
- Kawasan pertambangan mineral logam di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo.
 - Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur
 - Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu diantaranya batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu, onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan

untuk potensi Potensi batubara di Jawa Timur tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung.

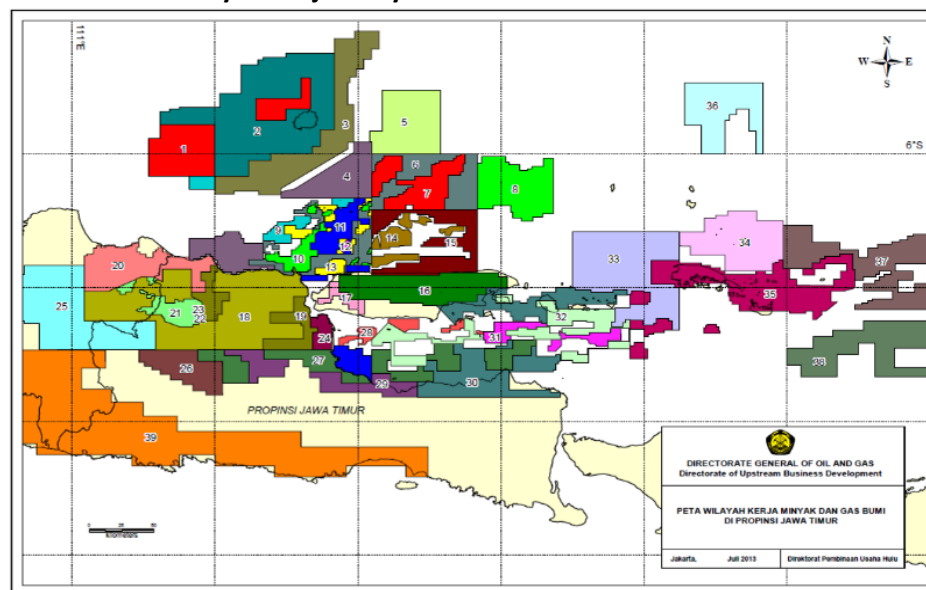
Gambar 1.14
Peta Kawasan Potensi Pertambangan Batuan Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- b. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi :** Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Jawa Timur berada di wilayah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, dan Kota Surabaya. Di wilayah Jawa Timur terdapat 39 blok migas, yang berstatus Produksi sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Kerja, status eksplorasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) Wilayah Kerja dan status development sebanyak 3 (tiga) Wilayah Kerja.

Gambar 1.15
Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

- c. **Potensi Panas Bumi atau Geothermal** adalah sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif.

Tabel 1.6
Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
1	Gunung Lawu	195	Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat
2	Arjosari	18,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
3	Melati	13,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
4	Ngebel - Wilis	165	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun	Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal
5	Gunung Wilis	50	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab.	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
			Tulungagung dan Kab. Trenggalek	3 Juni 2014
6	Gunung Pandan	60	Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
7	Songgoriti	35	Kota Batu dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014
8	Arjuno - Welirang	185	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)
9	Bromo - Tengger	-	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy
10	Krucil-Tiris	147	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy
11	Iyang - Argopuro	295	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy
12	Gunung Raung	-	Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi	Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy
13	Blawan - Ijen	110	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy
14	Pulau Bawean	14,5	Kabupaten Gresik	Survei Rekonais Tahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
15	Gunung Kelud	belum teridentifikasi	Kabupaten Blitar dan Kediri	Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud
16	Parengan – Kec. Rengel	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Tuban	Terdapat sumber air panas: 1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 °C pH = 6,9 2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 °C pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Prov Jawa Timur

2.7 Potensi Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Daya Tarik Wisata Alam meliputi Air Terjun, Pantai, Goa, Danau, Goa, Gunung, Hutan, Telaga, dan Taman Nasional.

- Daya Tarik Wisata Budaya meliputi Candi, Makam, Tempat Ibadah, Peninggalan Budaya, dan Museum.
- Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia meliputi Bendungan, Taman Safari, Kebun Binatang, Kebun Raya, dan Waduk.

Gambar 1.16
Peta Potensi Pariwisata Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

2.8 Potensi Industri

Sektor industri merupakan sektor pendukung utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi hampir 29 persen, pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara.

Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri

Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.

Gambar 1.17
Peta Perwilayahan Industri Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 menyebutkan arahan pengembangan industri Pengembangan kawasan industri di Jawa Timur didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen, farmasi,

bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di wilayah Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

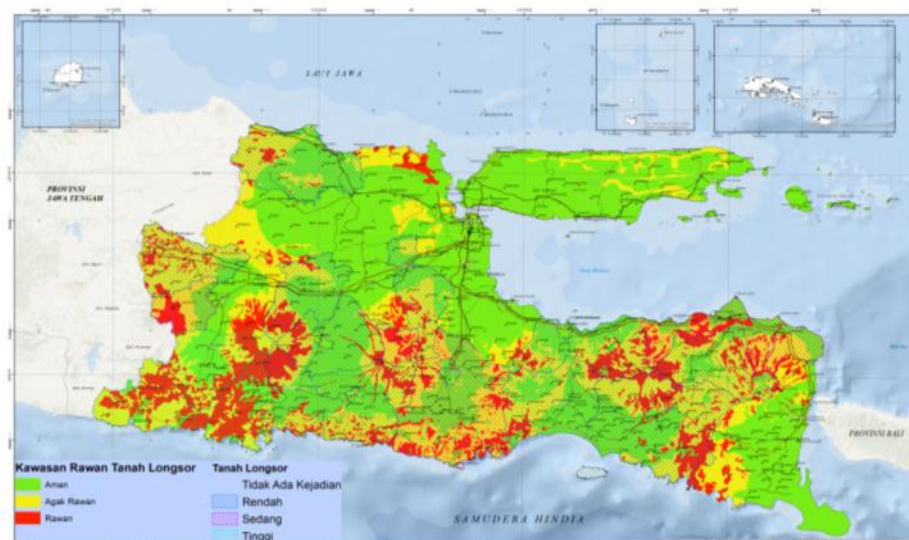
3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung.

3.1 Wilayah Rawan Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menurun atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Gambar 1.18
Peta Wilayah Rawan Tanah Longsor Provinsi Jawa Timur



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jatim terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelereng menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa gunung dan perbukitan.

3.2 Wilayah Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

3.3 Wilayah Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah suatu keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Tabel 1.7
Lokasi Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Bangkalan	Bangkalan	Potensi Menengah

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Banyuwangi	Glagah	Potensi Menengah
Blitar	Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben	Potensi Menengah
Bojonegoro	Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro	Potensi Menengah
Bondowoso	Grujugan, Tegalampel, Cerme	Potensi Menengah
Gresik	Gresik	Potensi Tinggi
Jember	Silo	Potensi Menengah
Jombang	Megaluh	Potensi Menengah
Kediri	Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates	Potensi Menengah
Lamongan	Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi	Potensi Tinggi
Lumajang	Tempeh, Tempursari, Pronojiwo	Potensi Menengah
Madiun	Kebonsari, Sawahan, Wonosari	Potensi Menengah
Magetan	Plaosan, Bendo, Kawedanan	Potensi Menengah
Malang	Kepanjen, Pakisaji	Potensi Menengah
Mojokerto	Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging	Potensi Menengah
Nganjuk	Rejoso	Potensi Menengah
Ngawi	Ngrambe, Padas	Potensi Menengah
Pacitan	Ngadirojo, Kebonagung	Potensi Menengah
Pasuruan	Purwosari, Kraton	Potensi Menengah
Ponorogo	Jetis, Kauman, Siman	Potensi Menengah
Probolinggo	Kota Anyar, Paiton	Potensi Menengah
Sampang	Sreseh, Jrengik, Sampang	Potensi Menengah
Sidoarjo	Krian, Taman, Sidoarjo	Potensi Menengah
Situbondo	Sumbermalang, Situbondo	Potensi Menengah
Sumenep	Sumenep	Potensi Rendah
Trenggalek	Pule	Potensi Menengah
Tuban	Jatirogo, Bancar, Tuban	Potensi Menengah
Tulungagung	Pagerwojo, Gondang, Kalidawir	Potensi Menengah
Kota Pasuruan	Rejoso	Potensi Rendah
Kota Surabaya	sebagian besar wilayah Kota Surabaya	Potensi Menengah
Kota Malang	Wilayah Kota Bagian tengah dan timur	Potensi Rendah

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

3.4 Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik-titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunungberapi, maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur meliputi kawasan di Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan-kawasan dengan potensi angin puting beliung.

3.5 Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan rawan bencana alam geologi di Provinsi Jawa Timur meliputi kawasan rawan bencana letusan gunung api, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami dan kawasan rawan luapan lumpur.

➤ Wilayah Rawan Letusan Gunung Api

Gunung api adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan (magma)/rempah lepas/gas yang berasal dari bagian dalam bumi. Kawasan rawan letusan gunung api di Jawa Timur berada pada lereng gunung api yang masih aktif. Terdapat 7 (tujuh) gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan bencana letusan. Kawasan yang diindikasikan dapat meletus/mengeluarkan lava, asap beracun dan mengeluarkan debu pasir, meliputi :

- Ijen (Bondowoso dan Banyuwangi)
- Semeru (Bondowoso dan Banyuwangi)
- Bromo (Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan)
- Lamongan (Lumajang dan Probolinggo)
- Arjuno-Welirang (Pasuruan dan Mojokerto)
- Kelud (Kediri, Blitar dan Malang)
- Raung (Banyuwangi, Bondowoso dan Jember)

Gambar 1.19
Peta Rawan Bencana Gunung Berapi



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

➤ **Wilayah Gempa Bumi**

Kawasan Rawan Gempa bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara termasuk retakan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau pelepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII Modified Mercally Intensity (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.

Gambar 1.20
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

➤ Wilayah Rawan Tsunami

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang “ring of fire” yang melintasi Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Resiko tsunami terbagi menjadi

- Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten umajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
- Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
- Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten

Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.

Gambar 1.21
Peta Rawan Bencana Tsunami



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur, 2012

➤ Wilayah Rawan Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (land subsidence) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahkan pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi:

- Penanganan luapan lumpur meliputi :
 - ✓ Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital.
 - ✓ Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.
- Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:
 - ✓ Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru
 - ✓ Normalisasi saluran drainase utama
 - ✓ Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas

- ✓ Perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.
- ✓ Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang \pm 14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong.
- ✓ Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya – Gempol, dan
- ✓ Konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya
- Pengamanan Kali Porong meliputi:
 - ✓ Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong.
 - ✓ Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan
 - ✓ Memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- Penanganan dampak sosial akibat luapan lumpur meliputi:
 - ✓ Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
 - ✓ Perlindungan sosial terhadap hak-hak atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur; dan
 - ✓ Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.

3.6 Kawasan Rawan Kekeringan

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam:

- Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri
- Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
- Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo,

Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep

4. Demografi

4.1 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Konsep penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap (BPS, 2014;102).

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Komposisi penduduk timpang akan menyebabkan beban kerja pemerintah semakin berat, sementara masalah kepadatan penduduk dapat mengakibatkan masalah lingkungan karena daya dukung alam yang tidak memadai. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan agar dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan.

Tabel 1.8
Indikator Kependudukan Provinsi Jawa Timur

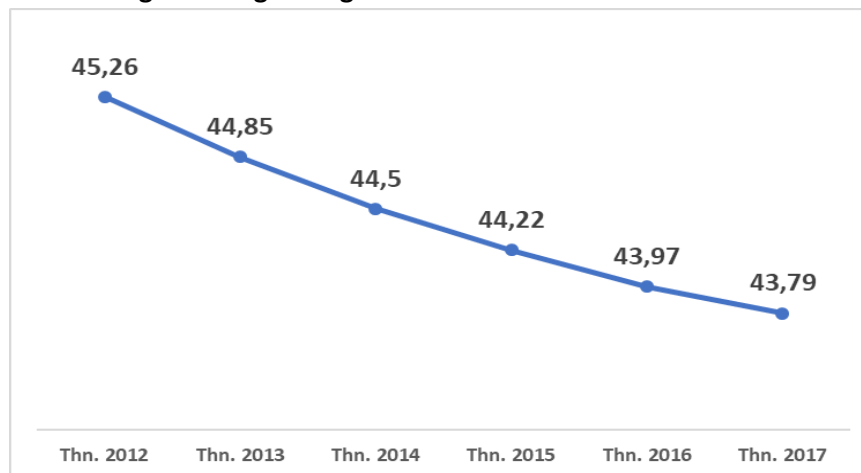
No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	38.363	38.610	38.847	39.075	39.293
2	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	800	805	810	815	819
3	Sex Ratio (L/P) (%)	97,43	97,40	97,44	97,48	97,50

5	Jumlah Rumah Tanggal (000 ruta)	10.656	10.775	10.676	10.801	-
6	Rata-Rata ART (jiwa/ruta)	3,6	3,6	3,62	3,62	-
	<i>Menurut Kelompok Umur</i>					
7	0 - 14 thn (%)	23,75	23,47	23,19	22,91	22,64
8	15 – 64 thn (%)	69,04	69,20	69,34	69,46	69,54
9	Di atas 65 thn (%)	7,21	7,33	7,47	7,63	7,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013–2017) jumlah penduduk Jawa Timur selalu mengalami kenaikan. Pada 2013 Jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 38,36 juta jiwa dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 39.293 juta jiwa yang terdiri dari 19,4 juta laki-laki dan 19,9 juta jiwa perempuan. Sex ratio penduduk sebesar 97,50, artinya setiap per 100 orang perempuan terdapat laki-laki sebanyak 97,50 orang. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur tahun 2017 meningkat 4 poin dibanding tahun 2016 mencapai 819 jiwa per km².

Gambar 1.22
Angka Ketergantungan Penduduk Jawa Timur 2012-2017



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

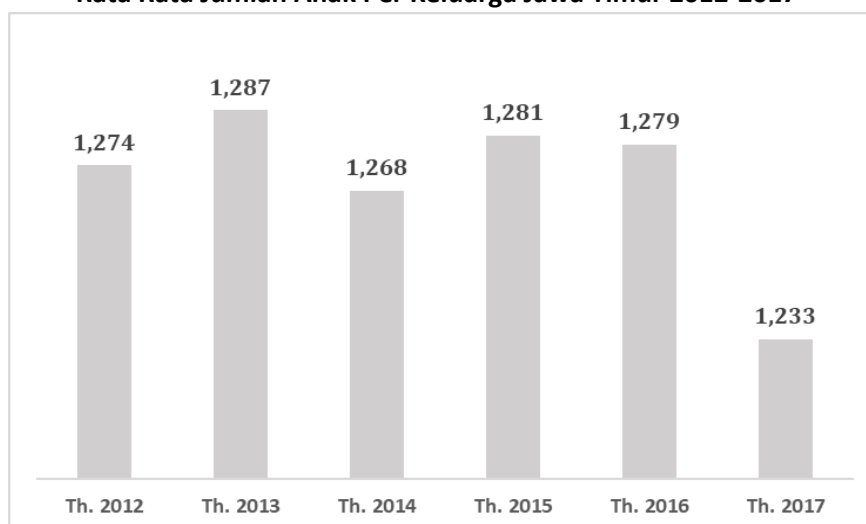
Tahun 2017 distribusi penduduk usia muda tercatat sebesar 22,64 persen, usia produktif sebesar 69,54 persen dan usia tua sebesar 7,82 persen. Selama periode 2012 hingga tahun 2017 angka ketergantungan penduduk menunjukkan penurunan. Pada tahun 2012 angka ketergantungan tercatat 45,26 dan menurun menjadi 43,79 di tahun 2017. Capaian tahun 2017 menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 43-44 orang

usia tidak produktif. Keberhasilan Program KB di Jawa Timur merupakan salah satu penyebab menurunnya angka ketergantungan penduduk.

4.2 Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang merupakan keseimbangan antara penyebab adanya pengurangan penduduk dan juga penambahan penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah faktor kelahiran. Rata rata jumlah anak per keluarga merupakan tolak ukur untuk mengetahui angka kelahiran.

Gambar 1.23
Rata Rata Jumlah Anak Per Keluarga Jawa Timur 2012-2017



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

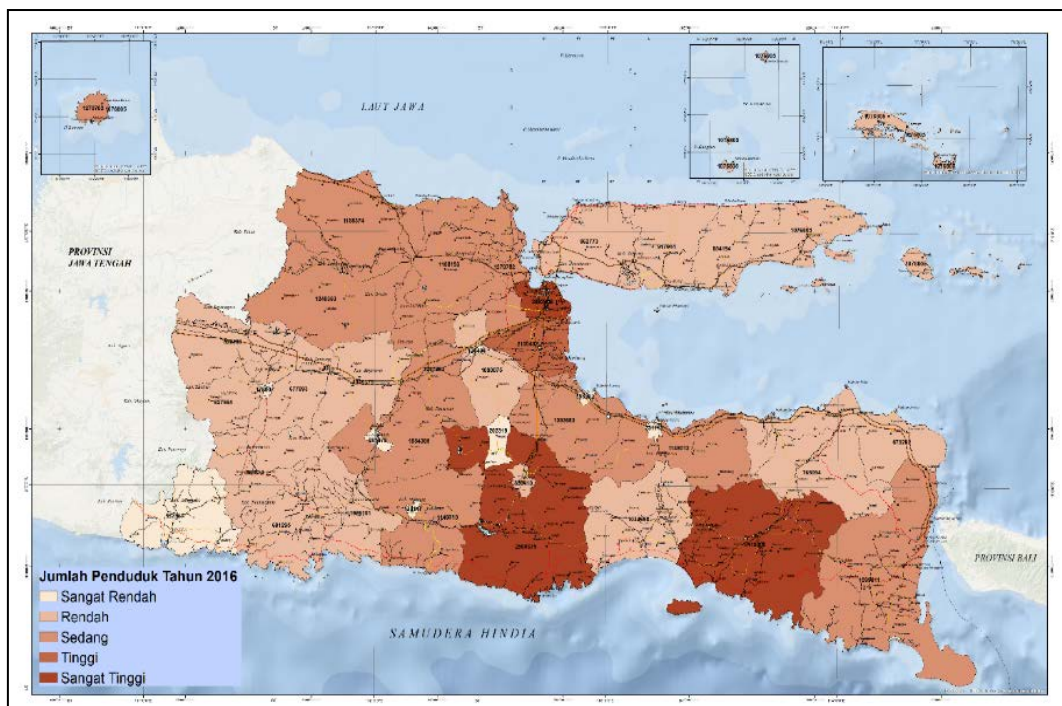
Jawa Timur merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua setelah Jawa Barat. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai 38,36 juta jiwa dan terus meningkat menjadi 39,29 juta jiwa pada tahun 2017. Hal ini juga selaras dengan kepadatan penduduknya yang terus meningkat hingga 819 Jiwa/Km² pada tahun 2017. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), diketahui bahwa rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada periode 2012 – 2017 di Jawa Timur sekitar 1-2 orang. Jika pendekatan keluarga adalah rumah tangga, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Jawa Timur sekitar 2 - 3 anak. Dengan rendahnya angka kelahiran, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berhasil

melaksanakan program pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

4.3 Distribusi/Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Secara administratif penduduk Jawa Timur tersebar di 38 Kabupaten Kota, dimana penduduk terpadat adalah Kota Surabaya dan yang terendah adalah Kabupaten Pacitan.

Gambar 1.24
Peta Persebaran Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2016



Sumber : Jawa Timur Dalam Angka 2017

Tabel 1.9
Perkembangan Pesebaran Penduduk Jawa Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota		Perempuan			Laki-Laki		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten							
01	Pacitan	281.298	282.090	269.616	268.183	268.896	282.691
02	Ponorogo	433.231	433.889	434.302	432.578	433.504	434.512
03	Trenggalek	345.687	346.803	343.402	341.094	342.397	347.893
04	Tulungagung	520.891	523.492	500.191	495.083	497.698	525.910
05	Blitar	569.490	571.689	575.877	571.303	573.707	573.833
06	Kediri	766.923	770.671	780.097	772.006	776.212	774.288
07	Malang	1.257.474	1.265.804	1.286.867	1.269.613	1.278.511	1.273.808
08	Lumajang	525.474	527.273	504.682	500.904	502.920	529.016
09	Jember	1.218.093	1.224.298	1.188.866	1.176.515	1.182.817	1.230.134
10	Banyuwangi	798.158	801.065	795.976	789.924	793.018	803.835
11	Bondowoso	388.484	390.617	372.603	368.505	370.588	392.491
12	Situbondo	341.340	343.213	328.279	324.673	326.500	345.003
13	Probolinggo	580.301	584.179	559.999	552.389	556.301	588.013
14	Pasuruan	792.387	798.377	789.480	777.120	783.410	804.203
15	Sidoarjo	1.037.328	1.053.650	1.080.401	1.046.596	1.063.629	1.070.081
16	Mojokerto	535.970	540.776	544.475	534.516	539.613	545.600
17	Jombang	620.674	623.791	620.405	613.827	617.194	626.898
18	Nganjuk	522.126	524.004	519.717	515.597	517.712	525.658
19	Madiun	341.467	342.570	334.495	332.521	333.517	343.498
20	Magetan	321.596	321.927	305.791	305.018	305.486	322.193
21	Ngawi	423.246	423.670	405.480	404.583	405.113	424.000
22	Bojonegoro	623.395	625.294	613.207	608.991	611.313	627.176
23	Tuban	580.818	583.591	572.095	566.279	569.324	586.279
24	Lamongan	610.688	610.983	577.111	576.396	576.812	611.082
25	Gresik	626.330	633.489	630.017	615.283	622.824	640.685
26	Bangkalan	494.220	498.595	459.776	451.601	455.710	502.997
27	Sampang	474.801	480.407	461.790	451.110	456.394	485.824
28	Pamekasan	429.917	434.514	415.217	406.307	410.800	438.977
29	Sumenep	559.772	562.322	512.211	507.430	509.791	564.594
Kota							
71	Kediri	139.494	140.511	140.503	138.578	139.493	141.475
72	Blitar	69.101	69.507	69.001	67.802	68.401	70.116
73	Malang	428.991	431.585	422.276	416.982	419.713	434.134
74	Probolinggo	115.050	116.324	113.781	111.727	112.689	117.331
75	Pasuruan	97.512	98.217	97.183	95.817	96.598	99.019
76	Mojokerto	63.437	63.890	62.196	61.282	61.816	64.208
77	Madiun	90.050	90.391	84.897	84.323	84.604	90.710
78	Surabaya	1.434.640	1.441.900	1.414.025	1.399.284	1.406.683	1.448.381
79	Batu	98.712	99.583	101.719	99.896	100.902	100.600
Jawa Timur		19.558.566	19.674.951	19.288.006	19.051.636	19.172.610	19.787.146

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

4.4 Komposisi Penduduk

4.4.1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tahun 2017 menunjukkan keadaan lebih baik dibandingkan tahun 2016. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan jumlah pengangguran. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2017 dan bertambah sebanyak 48 ribu orang dibanding keadaan Pebruari 2017. Peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut otomatis berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat dari 66,14 persen pada Agustus 2016 menjadi 68,78 persen pada Agustus 2017 atau naik sebesar 3,84 persen poin.

Tabel 1.10
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut
Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur

NO	Jenis Kegiatan Utama	Satuan	Tahun					
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angkatan Kerja	Juta	20,23	20,43	20,14	20,27	19,95	20,94
	> Berkerja	Juta	19,41	19,55	19,30	19,36	19,11	20,10
	> Pengangguran	Juta	0,82	0,88	0,84	0,91	0,84	0,84
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,62	69,92	68,12	67,84	66,14	68,78
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,09	4,30	4,19	4,47	4,21	4,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam menangani masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Jawa Timur pada Agustus 2017 sebesar 4,00 persen atau turun sebesar 0,21 persen poin dibandingkan keadaan Agustus 2016 sebesar 4,21 persen.

4.4.2. Pendidikan

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2014-2016, telah berhasil meningkatkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama

bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,05 tahun 2014 menjadi 7,23 pada tahun 2016, selanjutnya Angka Melek Huruf pada tahun 2014 sebesar 95,49 persen meningkat menjadi 96,06 persen pada tahun 2016. Demikian pula untuk Harapan Lama Sekolah juga terus meningkat, yaitu masing-masing 12,45 tahun (2014); 12,66 tahun (2015); dan 12,96 tahun (2016).

4.4.3. Penduduk Menurut Agama

Agama merupakan salah satu hak asasi paling dasar dari manusia yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Hak untuk memilih dan menyakini sebuah doktrin keagamaan tersebut, lahir secara otomatis ketika tiap manusia menjalani kehidupannya baik secara individu maupun sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu. Berdasarkan data Kanwil Departemen Agama Jawa Timur, penduduk Jawa timur mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 39,657,788 orang (94,35%), diikuti Kristen Protestan 3,02 persen, Khatolik 1,17 persen, Hindu 0,93 persen, Budha 0,48 persen dan Konghucu 0,02 persen.

C. KONDISI EKONOMI

1. Pertumbuhan Ekonomi

➤ PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Jawa Timur tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,91 persen; diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,47 persen; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 6,92 persen.

Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 29,03 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,80 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-

Sepeda Motor sebesar 18,18 persen. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2017, Lapangan Usaha Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,66 persen, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,14 persen; Konstruksi 0,63 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,41 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,17 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tumbuh melambat dari 2,41 persen pada tahun 2016 menjadi 1,48 persen pada tahun 2017. Curah hujan tinggi dan serangan hama di beberapa wilayah menyebabkan turunnya produksi tanaman pangan terutama padi. Faktor tersebut yang mengakibatkan Sub Kategori Tanaman Pangan berkontraksi sebesar -2,18 persen. Sedangkan pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh meningkat dari 4,44 persen pada tahun 2016 menjadi 5,69 persen pada tahun 2017.

Ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2017 terhadap triwulan yang sama di tahun sebelumnya (y-on-y) tumbuh sebesar 5,72 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 9,03 persen; diikuti Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,20 persen; dan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,55 persen. Pertumbuhan Sub Kategori Penyediaan akomodasi meningkat dibanding dengan Triwulan IV-2016 yaitu sebesar 2,36 persen menjadi 9,03 persen di Triwulan IV-2017, hal ini disebabkan karena meningkatnya Tingkat Penghunian Kamar terutama di akhir tahun 2017.

Pertumbuhan Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi pada triwulan ini didorong oleh meningkat trafik data penyedia jaringan operator yang semakin bersaing memberikan kualitas terbaik bagi pengguna datanya. Kebutuhan data internet semakin meningkat seiring dengan hadirnya e-commerce dan jejaring sosial media. Ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2017 dibanding triwulan III-2017 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -2,18 persen. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa kegiatan pertanian sudah melewati masa panen, sehingga terjadi

penurunan produksi pada triwulan IV, seperti padi dan palawija, hortikultura dan perkebunan. Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontraksi sebesar -25,19 persen akibat penurunan Sub Kategori Tanaman Pangan yang tumbuh negatif sebesar -51,33 persen. Begitu pula dengan Sub Kategori Perikanan yang juga mengalami kontraksi akibat dari dampak cuaca alam yang tidak menguntungkan tersebut. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,94 persen; diikuti Konstruksi sebesar 5,23 persen; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 4,60 persen.

➤ **PDRB Menurut Pengeluaran**

Perekonomian Jawa Timur dari sisi pengeluaran tahun 2017 tumbuh sebesar 5,45 persen sedikit turun 0,13 point bila dibandingkan tahun 2016. Sebagian besar komponen mengalami pertumbuhan, kecuali Komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami kontraksi sebesar 4,26 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto) sebesar 6,07 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,54 persen dan Komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 3,47 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada 2017 tidak menunjukkan perubahan yang berarti, aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Timur yaitu sebesar 59,07 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 28,96 persen dan Ekspor Luar Negeri sebesar 14,07 persen.

Dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2017, komponen PK-RT merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,73 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 1,67 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dari komponen lainnya sebesar 1,05 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2017 terhadap triwulan IV-2016 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,72 persen. Pertumbuhan terjadi di seluruh komponen PDRB Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,90 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 4,65 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga sebesar 3,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2017 mengalami kontraksi sebesar -2,18 persen, melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2016 (q -to-q). Disamping ekspor migas, ekspor komoditas unggulan Jatim yakni perhiasan/permata dan ekspor bahan kimia organik juga turun. Ekspor jasa berkontraksi seiring dengan penurunan jumlah wisman yang berkunjung ke Jatim selama triwulan 4 2017. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Pemerintah (PK-P) sebesar 11,26 persen dan PMTB 1,33 persen. Terjadi karena penyerapan anggaran akhir tahun terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja sosial untuk bencana banjir dan tanah longsor serta perbaikan sarana umum.

2. Inflasi

Sampai dengan Bulan Desember 2017 secara tahunan kalender inflasi Jawa Timur mencapai 4,04 persen, ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang tidak mencapai empat persen. Walaupun inflasi kalender tahunan 2017 mengalami kenaikan, namun angka ini masih sejalan dengan target pemerintah yang mematok angka inflasi sebesar 4 plus minus 1 persen.

Selama tahun 2017 dari tujuh kelompok pengeluaran, seluruhnya mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 6,00 persen, diikuti kelompok Sandang sebesar 5,72 persen, kelompok Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 5,56 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sebesar 4,09 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 3,92 persen, kelompok Kesehatan sebesar 2,59 persen, dan kelompok Bahan Makanan sebesar 0,90 persen,

Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi sepanjang tahun 2017 di Jawa Timur adalah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, beras, bensin, emas perhiasan, tarif pulsa ponsel, telur ayam ras, sewa rumah, rokok kretek filter, dan wortel. Sedangkan komoditi utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi adalah bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula pasir, tarif angkutan udara, semen, cabai merah, telepon seluler, melon dan gipsum. Tarif listrik memberikan sumbangan utama terjadinya inflasi di tahun 2017 disebabkan adanya pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan kategori 900 VA yang dianggap mampu, Pencabutan subsidi ini dilakukan bertahap mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Selain itu juga adanya kenaikan tarif listrik pasca bayar pada bulan Desember 2016 yang dampaknya baru dirasakan di pada bulan Januari 2017. Selain pencabutan subsidi listrik, pada bulan Januari 2017 juga terjadi kenaikan harga BBM, Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2017 pemerintah telah menaikkan harga BBM non subsidi mulai dari jenis Pertalite hingga Pertamina Turbo dengan kenaikan rata-rata sebesar 300 rupiah per liter, selain itu mulai 6 Januari 2017 pemerintah juga menaikkan biaya pembuatan STNK dan BPKB dengan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 yang berisi tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Komoditas beras turut memberikan andil inflasi tahun 2017. Kenaikan beras terjadi di triwulan III tahun 2017, selain faktor cuaca yang mempengaruhi turunnya produksi beras serta juga pasokan beras yang sedikit tersendat, kenaikan harga beras juga dipengaruhi oleh adanya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras oleh pemerintah pada tanggal 1 September 2017, Kenaikan beras ini terjadi sampai dengan akhir tahun 2017.

Selain beberapa komoditas yang mendorong terjadinya inflasi, beberapa komoditas lain justru mampu menahan laju inflasi selama tahun 2017. Harga bawang merah sepanjang tahun 2017 cenderung mengalami penurunan dikarenakan melimpahnya produksi. Berbeda halnya dengan bawang merah, harga bawang putih justru sempat melambung tinggi di awal tahun yang disebabkan kelangkaan produksi, mengingat sebagian besar bawang putih yang beredar di pasaran berasal dari impor. Harga bawang putih kembali normal setelah impor kembali dibuka dan dilakukan

operasi pasar di beberapa titik pasar. Produksi cabai rawit yang cukup melimpah karena kondisi cuaca yang baik pada tahun 2017 membuat harganya relatif stabil. Harga cabai rawit mulai merangkak naik di akhir tahun 2017 akibat kondisi cuaca yang kurang mendukung di awal musim penghujan. Sebaliknya harga gula pasir justru sempat naik di awal tahun, namun harganya segera normal kembali setelah adanya keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula pasir yang dijual di pasar ritel modern dan distributor gula sebesar Rp 12,500/kg pada bulan Mei 2017.

Berdasarkan pengelompokan disagregasi inflasi/kelompok komponen inflasi selama 2017 menunjukkan seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen barang yang diatur pemerintah mengalami inflasi tertinggi yaitu mencapai 10,69 persen, kemudian diikuti komponen inti sebesar 3,26 persen, dan komponen yang bergejolak sebesar 0,53 persen. Andil terbesar terjadinya inflasi ialah berasal dari komponen inti yaitu sebesar 2,13 persen kemudian komponen yang diatur pemerintah menyumbang 2,03 persen, dan komponen yang bergejolak menyumbang sebesar 0,09 persen. Komoditas kelompok barang yang diatur pemerintah yang mempunyai andil besar terjadinya inflasi 2017 ialah tarif listrik, biaya perpanjangan STNK, bensin, dan rokok kretek filter. Untuk komponen barang atau komoditas inti andil inflasi terbesar ada di komoditas emas perhiasan, tarif pulsa ponsel, sewa rumah. Sedangkan komoditas yang memiliki andil terbesar dalam kelompok barang yang bergejolak antara lain beras, telur ayam ras, dan wortel.

3. Perdagangan (Ekspor-Impor)

➤ Ekspor

Nilai ekspor Jawa Timur Desember 2017 mencapai USD 1,55 miliar atau turun 12,29 persen dibandingkan November 2017, tetapi apabila dibandingkan dengan Desember 2016 nilai ekspor pada bulan ini naik sebesar 0,19 persen.

Ekspor nonmigas Desember 2017 mencapai USD 1,42 miliar atau turun 14,28 persen dibandingkan November 2017, tetapi apabila dibandingkan dengan Desember 2016 maka mengalami penurunan sebesar 3,29 persen. Ekspor migas Desember 2017 mencapai USD 0,13 miliar atau naik 17,12 persen dibandingkan

November 2017. Apabila dibandingkan Desember 2016, naik sebesar 63,54 persen.

Komoditas utama ekspor nonmigas Desember 2017 adalah Perhiasan/Permata sebesar USD 149,17 juta, diikuti Kayu, Barang dari Kayu sebesar USD 118,58 juta serta Ikan dan Udang sebesar USD 114,31 juta.

Negara penerima barang ekspor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2017 adalah Jepang dengan nilai USD 2,90 juta (15,75 persen), Amerika Serikat USD 2,34 juta (12,72 persen), dan Tiongkok sebesar USD 1,74 juta (9,49 persen). Ekspor nonmigas ke ASEAN mencapai 3,97 USD juta (21,59 persen), sementara ke Uni Eropa mencapai USD 1,60 juta (8,72 persen).

➤ **Impor**

Nilai Impor Jawa Timur Desember 2017 mencapai USD 2,02 miliar atau naik sebesar 0,67 persen dibandingkan November 2017. Angka ini mengalami penurunan 0,07 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2016.

Impor nonmigas Desember 2017 mencapai USD 1,56 miliar atau turun 1,55 persen dibandingkan November 2017. Nilai impor nonmigas tersebut turun 10,37 persen dibandingkan dengan Desember tahun sebelumnya. Impor migas Desember 2017 mencapai USD 0,46 miliar atau naik 9,05 persen dibanding November 2017. Bila dibandingkan bulan Desember 2016, angka tersebut mengalami kenaikan 65,94 persen.

Komoditas utama impor nonmigas bulan Desember 2017 adalah golongan Mesin-mesin/Peralatan Mekanik sebesar USD 175,50 juta (11,26 persen), berikutnya disusul golongan barang Besi dan Baja sebesar USD 173,46 juta (11,13 persen) dan golongan barang Buah-buahan sebesar USD 100,70 juta (6,46 persen).

Negara asal barang impor nonmigas terbesar selama Januari-Desember 2017 adalah Tiongkok dengan nilai USD 5,01 miliar, Amerika Serikat sebesar USD 1,30 miliar, dan Korea Selatan sebesar USD 0,92 miliar. Impor nonmigas dari ASEAN mencapai USD 2,43 miliar, sementara impor nonmigas dari Uni Eropa mencapai USD 1,79 miliar selama periode Januari-Desember 2018.

4. Investasi

Total Nilai Izin Prinsip Tahun 2017 sebesar Rp. 328,15 Trilyun, meningkat sebesar 434.19 % dari Tahun 2016 (Rp. 61,43 T) :

- PMA : 330 Proyek ; Rp. 269,87 Trilyun ; 40.125 Tng Kerja;
- PMDN : 841 Proyek ; Rp. 58,28 Trilyun ; 48.180 Tng Kerja;
- PMA & PMDN : 1.171 Proyek ; Rp. 328,15 Trilyun ; 88.395 Tng Kerja

Total Realisasi Investasi Tahun 2017 sebesar Rp. 152,39 Trilyun, dengan capaian 98,29% dari s/d Tahun 2016 (Rp. 155,04 T) :

- PMA : 2.527 Proyek ; Rp. 21,49 Trilyun ; 78.496 Tng Kerja;
- PMDN : 2.165 Proyek ; Rp. 45,04 Trilyun ; 69.290 Tng Kerja;
- PMA & PMDN : 4.692 Proyek ; Rp. 66,53 Trilyun ; 147.786 Tng Kerja;
- PMDN Non Fas. : 129.260 Unit Usaha ; Rp. 85,86 Trilyun ; 451.076 Tng Kerja

Kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu DPMPTSP Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 : 38.545 izin/non izin dengan nilai investasi Rp. 41,46 Trilyun.

Prosentase penerbitan izin/non izin s/d Tahun 2017 :

- Sektor Kesehatan : 73,20%
- Sektor Peternakan : 5,85 %
- Sektor Energi Sumber Daya Mineral : 4,92 %
- Sektor Perindustrian dan Perdagangan : 3,77 %
- Sektor Ketenagakerjaan & Kependudukan : 3,53 % dan
- 12 sektor lainnya : 8,73 %.

Sampai dengan Tahun 2017 telah menerbitkan :

- Izin Prinsip PMDN : 147 izin, nilai investasi : Rp. 28.049.312.322.683
- Izin Usaha PMDN : 72 izin, nilai investasi : Rp. 11.274.489.195.664 dan
- Izin PMDN Non Fasilitas : 153 izin, nilai investasi : Rp. 2.135.812.479.170